

B.32

**LAPORAN PENELITIAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PUBLIKASI ILMIAH
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**



**PENERAPAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM PEMENUHAN HAK
MASYARAKAT DI WILAYAH RAWAN PANGAN DI KABUPATEN TTS PROPINSI
NUSA TENGGARA TIMUR DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH**

Disusun oleh:

Ketua Pelaksana: Prof Dr Jeane Neltje Saly,SH.,MH.,APU

Anggota: Dr Ahmad Sudiro,SH.,MH.,MM

**PROGRAM PENELITIAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

JAKARTA

2017

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	i
RINGKASAN	ii
SUMMARY	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	V
A. LAPORAN HASIL PENELITIAN	
RINGKASAN DAN SUMMARY	ii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Teori Negara	7
B. Teori Tanggung Jawab Negara	10
C. Teori Modernisasi	13
D. Teori Pembangunan Hukum	19
BAB III METODE PENELITIAN	
	24
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Landasan Hukum	27
B. Keberadaan Pertanian Pangan Lokal Kabupaten TTS Soe	49
C. PROBLEMATIK Dan Solusi	51
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

Tanggung jawab pemerintah tertuang dalam Alinea ke empat Pembukaan UUD 1945, berbunyi "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...dstnya melalui pemenuhan hak dasar masyarakat di Kabupaten TTS Provinsi NTT, antara lain berupa pangan yang adalah adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman

Tipe penelitian hukum ini adalah penelitian hukum normatif, berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data antara lain dokumen hukum baik yang berupa peraturan perundang-undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, hasil penelitian sebelumnya, buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Di samping penelitian hukum normatif, dilakukan penelitian empiris untuk memperoleh bahan di lapangan guna melengkapi data penelitian antara lain melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait sebagai narasumber seperti ahli hukum, Pemerintah Daerah Kabupaten Timur Tengah Selatan, di Kota Soe pada Kantor Dinas Pangan dan Kantor Dinas Pertanian

Hasil penelitian adalah kendala dalam tanggung jawab pemerintah menciptakan pangan yang cukup bagi rakyat terkait dengan pangan untuk memenuhi kebutuhan dasar, memberikan manfaat secara adil, merata, dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan nasional bertujuan tercapainya perwujudan kedaulatan, kemandirian dan ketahanan pangan merupakan hal mendasar yang sangat besar arti dan manfaatnya untuk mendukung pelaksanaan kebijakan terkait penyelenggaraan pangan demi menunjang kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) Provinsi NTT adalah di samping keadaan geografis, curah hujan, air bersih, sumber daya manusia yang masih jauh dari harapan baik secara kualitas maupun kuantitas, transportasi, dan infrastruktur untuk komunikasi dari desa ke desa selanjutnya ke lokasi pemasaran, juga mengalami tantangan pangan semakin hari semakin kompleks, senantiasa berubah dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya spesifik lokal maupun global. Perubahan serta perbedaan seperti kondisi aktual masyarakat, dinamika kependudukan, perkembangan iptek, revolusi informasi, telekomunikasi, transportasi, demokratisasi, desentralisasi, dan tentunya globalisasi, merupakan determinan pangan sebagai landasan untuk melakukan antisipasi nasional.

Kata Kunci: Tanggung jawab Pemerintah, Pangan Lokal, dan Ketahanan

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kendala yang dihadapi dan upaya dalam pelaksanaan ketahanan pangan, khususnya di Soe Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS) merupakan salah satu problematik, penerapantanggung jawab pemerintah,¹ melalui pemenuhan pangan lokal.

Problematic tersebut merupakan salah satu aspek penghambat Negara dalam mensejahterakan rakyat untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara, tertuang dalam Pembukaan UUD 1945.²

Kasus gizi buruk di Indonesia masih menjadi perhatian utama pemerintah. Keadaan demikian bukan hanya di Indonesia, tetapi juga, hampir di negara-negara di dunia. Laporan Global Nutrition pada 2017,³ menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan ke-108 di dunia dengan kasus gizi buruk terbanyak yang berakibat terhambatnya pertumbuhan fisik balita, tapi juga berdampak pada organ bagian dalam tubuhnya di atas. Laos (124) dan Timor Leste (132). Posisi Indonesia ini bahkan lebih tinggi diantara negara-negara di ASEAN, seperti Thailand (46) Malaysia (47), Vietnam (55), Brunei (55), Philipina (88), bahkan Kamboja.⁴

Tujuan pembentukan Pemerintah Negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945, berbunyi:

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk *memajukan kesejahteraan umum*, mencerdaskan kehidupan bangsa, ...⁵ dstnya..

¹ Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Alinea ke 4

² Ibid

³ USDA, United States Departement Agriculture, Agricukture Research, Home And Gaeden BuletinNumber 72

⁴ <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/kasus-gizi-buruk-indonesia-urutan-ke-108-terbanyak-di-dunia/ar-AAou2O7>, Jakarta, Diakses 12 Desember 2017

⁵ Op.,Cit, Pembukaan UUD 45 , Alinea ke 4 .. Secara lengkap Pembukaan UUD 45 berbunyi: Isi Pembukaan UUD 1945 Republik Indonesia, Pembukaan UUD 1945